



**Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,
Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>

Diterima: 09 September 2024; Direview: 10 September 2024; Disetujui: 18 Oktober 2024

**Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta,
Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan**

***Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Sipituhuta Village,
Pollung District, Humbang Hasundutan Regency***

Tulus Lumban Gaol, Bahrum Jamil & Beltahmamero Simamora*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak:

Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif pemerintah yang menysasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan keterbatasan daya beli, memberikan bantuan untuk perumahan yang layak. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi program BSPS yang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PKP) di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Van Meter dan Varn Horn yang memiliki enam indikator, meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program BSPS di Desa Sipituhuta telah berjalan dengan baik, meskipun ada dua indikator yang belum terealisasi sepenuhnya. Keterbatasan dana bagi penerima bantuan dan ketidaksesuaian data lapangan menimbulkan kesulitan dalam pemindahan lokasi dan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa terkait dengan pendataan dan penentuan penerima bantuan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Abstract:

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is a government initiative aimed at Low-Income Communities (MBR) facing purchasing power limitations, providing support to acquire adequate housing. This research delves into implementing the BSPS program conducted by the Housing and Settlement Area Service (PKP Service) in Sipituhuta Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency. The study aims to identify inhibiting factors in the program's implementation. Employing the Implementation Theory by Van Meter and Varn Horn, incorporating six indicators – policy standards and objectives, resources, implementing organization characteristics, inter-organizational communication, executors' attitudes, and the socio-economic and political environment. The research follows a Descriptive method with a Qualitative approach, gathering data through observation, interviews, and documentation. Findings reveal that the BSPS Program in Sipituhuta Village is well-implemented, yet two indicators are inadequately realized, namely limited financial resources and discrepancies between the provided data and field situations. These issues hinder location transfers and cause misunderstandings between the community and the village government regarding beneficiary data.

Keywords: Implementation; Policy; Self-Help Housing Stimulant Assistance Program

How to Cite: Lumban Gaol, T., Jamil, B., & Simamora, B., (2024), Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(2) 2024: 128-135,

PENDAHULUAN

Rumah tidak hanya merupakan tempat berlindung dari kondisi alam dan gangguan eksternal, tetapi juga memiliki peran vital sebagai pusat kehidupan manusia. Selain kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan, rumah berfungsi sebagai habitat bagi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai budaya, membentuk generasi muda, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan perkembangan pribadi. Konsep hierarki kebutuhan oleh Maslow mempertimbangkan bahwa manusia melampaui kebutuhan dasar dan berupaya mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, seperti keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri (Maslow, 1998).

Kebutuhan akan rasa aman dalam sebuah rumah merupakan elemen penting; rumah yang memberikan keamanan psikologis dan fisik bagi penghuninya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan individu dan relasi antaranggota keluarga. Selain itu, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri tercermin dalam bagaimana rumah sebagai tempat di mana seseorang diakui, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional (Saputra et al., 2022). Melalui peran-pelajarannya, rumah mengilhami perkembangan sosial, emosional, dan intelektual, dan memberikan fondasi bagi pencapaian puncak kebutuhan aktualisasi diri pada individu. Ini menunjukkan bagaimana rumah tidak hanya sekadar sebuah bangunan, tetapi sebuah lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan manusia (Batudoka, 2005; Rohman & Rohman, n.d.).

Perumahan dan pemukiman memiliki peran yang jauh lebih dalam daripada sekadar menjadi tempat tinggal. Mereka membentuk landasan bagi struktur sosial masyarakat dan menjadi wadah bagi perkembangan budaya. Di dalam setiap rumah dan lingkungan pemukiman, tercipta sebuah rekayasa ruang yang mampu mempengaruhi bagaimana nilai-nilai, perilaku, dan hubungan antarindividu berkembang. Rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga simbol keberlangsungan keluarga, tempat di mana nilai-nilai, etika, dan kebiasaan ditanamkan dalam anggota keluarga. Pemukiman juga menjadi panggung bagi pertemuan sosial, tempat dimana interaksi antarwarga, jalinan komunitas, dan kebersamaan dilahirkan (Sutopo & Pramesti, 2017).

Di samping itu, perumahan dan pemukiman memainkan peran yang signifikan dalam memelihara dan mewariskan tradisi budaya. Mereka adalah wadah dimana tradisi turun temurun dilestarikan. Melalui arsitektur, tata letak, dan desain interior, setiap perumahan mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemukiman menjadi tempat di mana adat, ritual, dan perayaan lokal dirayakan, memperkuat identitas dan keberagaman budaya. Dengan demikian, perumahan tidak hanya mengakomodasi kebutuhan fisik manusia, tetapi juga bertindak sebagai katalisator keberlangsungan budaya yang beragam (Haris, 2014; Joga & Antar, 2009). Ketika dilihat sebagai entitas yang lebih dari sekadar tempat tinggal, perumahan dan pemukiman memiliki pengaruh mendalam dalam membentuk struktur sosial dan memelihara warisan budaya. Mereka bukan hanya menjadi tempat bagi individu untuk hidup, tetapi juga menjadi fondasi untuk keberlanjutan nilai-nilai, tradisi, dan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memahami perumahan sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai jaringan yang kompleks dari nilai-nilai, interaksi, dan warisan budaya yang terus berkembang. Di samping itu, perumahan dan pemukiman bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga lingkungan sosial yang mencakup komunitas yang beragam (Zahroh et al., 2020).

Dalam pemukiman, rumah menjadi titik pusat interaksi, tempat pertukaran informasi, dan pengetahuan. Selain itu, pemukiman yang dibangun dengan baik dan didukung oleh infrastruktur yang memadai dapat menjadi pusat pendidikan informal yang menguntungkan. Dalam lingkungan rumah yang sehat, keluarga dapat menciptakan pola interaksi dan komunikasi yang memengaruhi pembentukan karakter dan perkembangan anak-anak (Kadir & Lubis, 2019; Sitepu et al., 2019). Sebagai bagian dari pemukiman, perumahan bukan hanya tempat di mana individu berteduh. Ia mencerminkan gaya hidup, budaya, dan bahkan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial (Kadri Pratiwi et al., 2021; Nur et al., 2023). Dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak, perumahan memberikan aspek penting yang mendukung kehidupan manusia sehari-hari, termasuk akses

terhadap fasilitas umum dan kenyamanan hidup bagi penghuninya (Syafrina et al., 2018). Sehingga, perumahan dan pemukiman bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga fondasi bagi perkembangan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia.

Pemenuhan kebutuhan perumahan telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya menciptakan kondisi kehidupan yang lebih sejahtera (Syafrina et al., 2018). Meskipun demikian, hak dasar ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara berbagai upaya pembangunan rumah telah dilakukan, namun terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kategori MBR.

Tingginya biaya hidup, terutama dalam hal kepemilikan atau penyewaan rumah, menjadi hambatan utama bagi kelompok MBR untuk memenuhi kebutuhan perumahannya (Saputra et al., 2022). Keterbatasan daya beli mereka menyebabkan sulitnya akses terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Pada akhirnya, ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak dasar terhadap perumahan yang layak di antara lapisan masyarakat. Upaya dari pemerintah, bersama berbagai pemangku kepentingan, sangat diperlukan untuk menutup kesenjangan ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan (Hasibuan & Angelia, 2022; Sirait et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, penulis tertarik untuk mengembangkan sebuah penelitian lebih mendalam, yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)". Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini mencakup dua poin pokok. Pertama, bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedua, apa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di wilayah yang sama.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil dari pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di lokasi yang sama. Dengan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas program bantuan perumahan ini, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menyediakan rumah layak huni di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis hasil pelaksanaan program bantuan ini, termasuk evaluasi terhadap ketersediaan rumah yang memenuhi standar tinggal yang layak bagi masyarakat setempat. Fokus penelitian juga ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan BSPS di wilayah tersebut.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap proses implementasi BSPS di Desa Sipituhuta, khususnya terkait hasil yang telah tercapai dalam penyediaan rumah layak huni. Analisis mendalam tentang kendala-kendala dalam implementasi program diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap faktor-faktor yang menghambat kesuksesan program ini. Dari pemahaman yang lebih detail mengenai implementasi dan kendala yang dihadapi, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi perbaikan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas program bantuan perumahan di wilayah tersebut. Ini akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki pelaksanaan program BSPS, membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, dan akhirnya meningkatkan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan rumah layak huni.

Selama periode penelitian dari April 2023 hingga Mei 2023 di Kantor Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti memperoleh informasi dari berbagai

pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok yang memiliki pemahaman mendalam terkait pelaksanaan program bantuan. Informan kunci adalah Sekretaris Desa, yang memberikan wawasan dari perspektif administratif dan organisatoris di tingkat desa. Informan utama adalah Pengawas PKP Humbang Hasundutan, yang memiliki wawasan dari sisi pelaksanaan dan pengawasan program bantuan. Sementara informan tambahan adalah masyarakat yang merupakan penerima dan non-penerima bantuan BSPS, yang memberikan perspektif dari tingkat kebutuhan dan dampak program tersebut pada masyarakat setempat. Melalui kerja sama dengan para informan ini, peneliti berharap untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh terkait pelaksanaan dan dampak Program BSPS di Desa Sipituhuta.

Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk perilaku, persepsi, dan motivasi subjek penelitian (Suyanto & Sutinah, 2011). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena tersebut secara holistik, dengan mengumpulkan data melalui berbagai metode ilmiah, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Selain itu, teknik pengumpulan data juga mencakup triangulasi, di mana data dari berbagai sumber digunakan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

Dengan kombinasi berbagai metode dan teknik tersebut, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas pelaksanaan Program BSPS serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan program bantuan perumahan ini di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah berperan dalam menginisiasi pembangunan rumah melalui berbagai pihak terlibat. Meskipun tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, hak dasar terhadap perumahan yang layak untuk keseluruhan masyarakat masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang cenderung tinggi. Kendala ekonomi, terutama kemampuan daya beli yang terbatas, menjadi salah satu faktor yang signifikan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.

Masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksamaan akses terhadap layanan keuangan, kesulitan dalam memperoleh pembiayaan atau kredit perumahan, dan hambatan-hambatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan masyarakat, terutama MBR, dalam memiliki rumah yang layak. Kondisi ini menunjukkan ketidakterpenuhan hak dasar yang sangat fundamental, yakni perumahan yang layak, dan menjadi tantangan yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Diperlukan upaya terkoordinasi dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan, untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan ini.

Desa Sipituhuta, terletak di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang, didominasi oleh sektor agraris, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kopi dan sayuran. Pertumbuhan populasi yang meningkat memerlukan peningkatan kualitas hidup, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, kenaikan harga bahan pangan dan pendapatan yang rendah menyebabkan banyak penduduk desa ini kesulitan membangun rumah layak huni dan terpaksa tinggal di tempat yang tidak memadai.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Humbang Hasundutan telah dirancang pada tahun 2021 sebagai tahap pertama untuk 200 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut. Bantuan ini diserahkan dalam bentuk tabungan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000 per KK, di mana sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 17.500.000 dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000 untuk biaya upah tukang.

Van Meter dan Van Horn menciptakan Model Implementasi Kebijakan (1975) yang menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan berlangsung. Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan cenderung berjalan secara linear, dimulai dari keputusan politik, pelaksanaan, hingga kinerja kebijakan. Proses implementasi tersebut diwarnai oleh keterlibatan berbagai variabel dan bertujuan untuk mencapai kinerja kebijakan yang optimal (Van Meter & Van Horn, 1975).

Model ini Menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan dan keterukuran dalam menentukan arah dan tujuan program (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta, Kabupaten Humbang, standar dan sasaran kebijakan yang jelas merupakan landasan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Keberadaan standar dan sasaran yang spesifik dan terukur, seperti disarankan oleh teori Van Meter dan Varn Horn, memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program sehingga memungkinkan upaya peningkatan kualitas perumahan masyarakat khususnya bagi MBR.

Penelitian menunjukkan bahwa banyak warga Desa Sipituhuta tidak mampu membangun rumah layak huni karena kendala ekonomi dan keterbatasan daya beli. Terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Program BSPS merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan stimulan dalam bentuk tabungan untuk membeli bahan bangunan serta upah tukang. Dalam konteks ini, standar dan sasaran kebijakan yang jelas sangat diperlukan agar dana bantuan tersebut efektif digunakan dan mencapai target yang diharapkan.

Sejalan dengan teori Van Meter dan Varn Horn, keterukuran standar dan sasaran kebijakan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program bantuan perumahan seperti BSPS berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pelaksana program dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan di wilayah tersebut. Implementasi yang sukses dari program ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah layak.

2. Sumber Daya

Dalam analisis yang dikaitkan dengan variabel sumber daya, temuan dari penelitian pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menunjukkan pentingnya sumber daya, baik dalam bentuk manusia maupun material, dalam menentukan keberhasilan program. Sumber daya manusia, yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesediaan individu atau kelompok dalam menjalankan tugas, sangat berperan dalam implementasi program. Sementara itu, sumber daya material, terutama dalam hal dana atau bahan bangunan, merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program bantuan perumahan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam Program BSPS, sumber daya material berupa dana sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Ketersediaan dana yang cukup dan penggunaan yang tepat akan sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan program. Penekanan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut juga menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan kompeten dalam mengelola program menjadi aspek krusial untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi yang cermat terhadap ketersediaan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia maupun material, menjadi hal yang esensial untuk menjamin kelangsungan serta efektivitas program (Van Meter & Van Horn, 1975). Perannya dalam menentukan kelancaran dan kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan sangat penting untuk dipertimbangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi ini dapat memberikan pandangan yang jelas terkait dengan

ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memberikan pedoman dalam menjalankan program dengan lebih efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, karakteristik dari para pelaksana sangat penting. Karakter tersebut mencakup kedisiplinan, ketegasan dalam menjalankan aturan, serta kepatuhan pada peraturan hukum yang berlaku. Memiliki karakteristik yang kokoh dalam hal kedisiplinan serta kesesuaian dengan aturan merupakan faktor yang mendukung kelancaran jalannya suatu program (Van Meter & Van Horn, 1975).

Para pelaksana kebijakan atau program yang memahami aturan dan tunduk pada hukum akan membantu dalam menjaga kesinambungan program serta menjamin implementasi berjalan sesuai rencana. Hal ini akan meminimalkan potensi permasalahan yang timbul akibat ketidakkonsistenan, pelanggaran aturan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Dengan karakteristik yang keras dan ketat pada aturan, para pelaksana program dapat memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan kebijakan dengan konsistensi dan integritas. Hal ini akan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan rencana serta meminimalkan terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat mengganggu implementasi program.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Suatu Kegiatan Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi antara para pelaksana kebijakan atau organisasi terkait memegang peran penting. Komunikasi yang konsisten dan jelas antara pihak-pihak terkait akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Informasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus sejalan dengan standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika terjadi perbedaan informasi terkait standar dan tujuan kebijakan antar sumber informasi, ini dapat mengakibatkan ketidakselarasan antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilaksanakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Ketidakselarasan informasi akan menciptakan kebingungan di antara pelaksana kebijakan dan organisasi terkait, yang pada gilirannya akan mempersulit pelaksanaan kebijakan. Pertentangan dalam informasi yang diterima dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan tujuan kebijakan, sebab akan membantu meminimalkan hambatan dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Pandangan dan cara pandang terhadap pengaruh kebijakan memiliki dampak langsung pada sikap para pelaksana kebijakan terkait dengan kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Sikap penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan dapat memengaruhi seberapa jauh para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan tersebut. Jika sikap yang ditunjukkan adalah penerimaan, para pelaksana kebijakan mungkin akan secara proaktif mendorong dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, jika sikapnya adalah penolakan, pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terhambat atau bahkan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki sikap yang mendukung tujuan kebijakan dan memiliki komitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor penting yang melibatkan sumber daya ekonomi, lingkungan, dan struktur politik yang dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Lingkungan sosial yang terdiri dari norma, nilai, dan struktur sosial memainkan peran kunci dalam membentuk penerimaan dan pengaruh kebijakan. Selain itu, faktor ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber daya, kestabilan ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan dasar juga berpengaruh dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, faktor politik, termasuk

regulasi, kebijakan pemerintah, dan dinamika politik lokal, memiliki dampak besar terhadap jalannya kebijakan.

Lingkungan sosial yang kondusif, dukungan ekonomi yang memadai, serta stabilitas politik yang kuat dapat mendukung kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, ketidakstabilan sosial, keadaan ekonomi yang sulit, dan ketegangan politik dapat menjadi hambatan signifikan dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik dari lingkungan di mana kebijakan diterapkan merupakan kunci penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencakup beberapa aspek yang diidentifikasi dari hasil penelitian di lapangan. Pertama, pembatasan terkait peraturan dari pihak pusat yang melarang pemindahan lokasi rumah secara signifikan, kecuali dalam situasi tertentu seperti terjadinya bencana alam seperti longsor atau area rawa yang mengganggu. Keterbatasan ini membuat penyesuaian lokasi perumahan menjadi sulit dalam kasus-kasus tertentu, yang berpotensi menghambat proses pembangunan rumah bagi mereka yang membutuhkan relokasi yang lebih signifikan.

Kedua, data yang disampaikan oleh pihak desa kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) ternyata tidak sepenuhnya valid. Ketidakakuratan data ini dapat menimbulkan masalah dalam menentukan penerima bantuan perumahan dan menghambat proses identifikasi lokasi yang tepat untuk program BSPS.

Ketiga, terdapat kendala terkait kemampuan masyarakat dalam berswadaya untuk menambah dana yang diberikan oleh pihak dinas. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam menambah dana yang disediakan dapat menghambat keseluruhan pelaksanaan program, memperlambat proses pembangunan rumah, atau bahkan menghentikan proses pembangunan yang sudah dimulai.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan dalam menghambat efektivitas implementasi BSPS. Pembatasan peraturan, ketidakvalidan data yang disediakan, dan keterbatasan kemampuan finansial masyarakat menjadi hambatan utama dalam mencapai keberhasilan program ini. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap regulasi terkait perubahan lokasi, peningkatan validasi data, dan strategi untuk memperluas partisipasi finansial masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program bantuan perumahan ini.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menunjukkan pencapaian yang beragam berdasarkan keenam indikator yang digunakan dalam penelitian. Dari keenam indikator tersebut, empat indikator telah terealisasi dengan baik, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Namun, terdapat dua indikator yang menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan. Pertama, dalam indikator Komunikasi Antar Pelaksana, terdapat misinterpretasi atau miss komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat penerima bantuan terkait proses pendataan. Meskipun pemerintah desa berpendapat bahwa pendataan telah adil, beberapa masyarakat menganggap bahwa pendataan cenderung memihak, terutama ketika bantuan dibatasi. Kedua, dalam indikator Sumber Daya, dana yang disediakan bagi masyarakat penerima bantuan menunjukkan kendala, menyebabkan sebagian dari mereka harus menjual tanah atau meminjam dari bank untuk menutupi kekurangan dana, sementara beberapa masyarakat tidak dapat menerima bantuan karena kurangnya kemampuan berswadaya.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program BSPS terdiri dari beberapa kendala. Pertama, pembatasan peraturan pihak pusat yang melarang pemindahan lokasi rumah dalam jarak tertentu kecuali dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam. Kedua, ketidakvalidan data yang diberikan oleh pihak desa kepada PKP, yang dapat mempengaruhi proses identifikasi penerima

bantuan. Ketiga, kurangnya kemampuan masyarakat dalam berswadaya untuk menambah dana yang disediakan oleh dinas, mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya. Dampak dari hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan program BSPS sedikit terkendala dan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Batudoka, Z. (2005). Kota baru dan aspek permukiman mendapan. *SMARTek*, 3(1).
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Hasibuan, S. R., & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No . 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Implementation Of Regional Regulations Of Kota Med. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(3), 130–137. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1408>
- Joga, N., & Antar, Y. (2009). *Bahasa pohon selamatkan bumi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Implementation of Assistance for Livable Houses for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict , Rok. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 174–183.
- Kadri Pratiwi, A., Masitho Batubara, B., & Nasution, I. (2021). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan The Role Of The Cleaning And Gardening Services In The Management Of A Green Open Space In Medan City. *Oktober*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.773>
- Maslow, A. H. (1998). *Maslow on management*. John Wiley & Sons.
- Nur, D., Saragih, U., Kadir, A., Sembiring, W. M., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan The Effectiveness Of Management Of Village Fund Allocation In 2017 In The Effort Of Improv. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.778>
- Rohman, A., & Rohman, A. (n.d.). *Menggagas Perumahan Layak Bagi Keluarga Miskin Perkotaan*.
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Role Of The Village. *4(2)*, 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Sirait, R., Sinaga, R. S., & Lubis, M. S. (2021). Implementasi Undang-Undang No . 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan Implementation Of Law No . 1 Of 2011 On The Condition Of Housing F. *Strukturisasi : Jurnal Ilmiah Magister Adminisrasi Publik*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Sutopo, D. S., & Pramesti, N. (2017). Konseptualisasi Praktik Sosial dalam Lintas Ruang dan Waktu: Kehidupan Masyarakat di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 50–62.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Revisi). Kencana.
- Syafrina, A., Tampubolon, A. C., Suhendri, S., Hasriyanti, N., & Kusuma, H. E. (2018). Preferensi masyarakat tentang lingkungan perumahan yang ingin ditinggali. *RUAS*, 16(1), 32–45.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Zahroh, F., Meiliyandari, L. A., & Septianingrum, I. (2020). Identitas Arsitektur: Pencarian Hakikat Ruang Melalui Permukiman Kumuh. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 16(1), 1–5.